

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam proses pembangunan suatu negara, terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Pajak secara sederhana merupakan iuran wajib yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang telah diatur oleh pemerintah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengharapkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya semakin meningkat, mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia.

Pajak adalah sumber utama dalam pembangunan negara sehingga perlu ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik dengan prinsip kemandirian. Peran penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Target penerimaan pajak tahun 2016 adalah sebesar Rp1.350 triliun, target tersebut naik sebesar 4.32 persen jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar Rp1.294 triliun. Kenaikan tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) harus bekerja lebih keras dan memutar otak agar target penerimaan tahun ini tercapai. (www.pajak.go.id)

Menurut pelaksana Dirjen Pajak, Ken Dwijugiastadi 129 juta orang menghabiskan uangnya untuk berbelanja sebesar Rp.200 ribu/hari, namun hanya sekitar 27 juta orang yang terdaftar menjadi wajib pajak perorangan, sedangkan 102 juta orang tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak perorangan. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan motivasi para wajib pajak dalam membayar pajak dan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak,

karena seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya.

Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah negara menggunakan hasil pungutan pajak untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan umum. Sangat disayangkan apabila sebagai warga negara telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjadi wajib pajak namun tidak memiliki NPWP (dispenda.jabarprov.go.id, 16/02/2015). Namun demikian, tingkat kepatuhan penyampaian SPT masih rendah. Dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT (kemenkeu.go.id, 14/02/2015).

Sebagai negara yang berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan Negara (Listyaningtyas, 2012 : 1).

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya ke kantor pajak di wilayah dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Dalam sistem ini, wajib pajak diamanatkan untuk memiliki NPWP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU KUP bahwa Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan

Universitas Bhayangkara Jaya

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP menurut pasal 1 angka 6 UU KUP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan Pajak ini dilakukan untuk meminimalisasikan potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Walaupun pemungutan pada wajib pajak berdasarkan *Self Assessment*, namun dalam rangka pengawasan pelaksanaan kewajiban wajib pajak, maka Ditjen Pajak harus tetap melakukan pemeriksaan secara intensif pada wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi pengusaha. Karena wajib pajak tersebut sangat berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak.

Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2012-2016

Sumber Penerimaan	2012	2013	2014	2015	2016
I. Penerimaan Dalam Negeri	1332322.90	1432058.60	1545456.30	1758330.90	1846075.50
Penerimaan Perpajakan	980518.10	1077306.70	1146865.80	1489255.50	1565784.10
Pajak Dalam Negeri	930861.80	1029850.00	1103217.60	1439998.60	1524012.70
Pajak Penghasilan	465069.60	506442.80	546180.90	679370.10	763470.50
PPN	337584.60	384713.50	409181.60	576469.20	573690.60
PBB	28,968.90	25,304.60	23,476.20	26,689.90	19,433.70
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0	0
Cukai	95,027.90	108,452.00	118,085.50	145,739.90	155,519.60
Pajak Lainnya	4,210.90	4,937.10	6,293.40	11,729.50	11,898.40
Pajak Perdagangan Internasional	49,656.30	47,456.60	43,648.10	49,256.90	41,771.30
Bea Masuk	28,418.40	31,621.30	32,319.10	37,203.90	38,902.00
Pajak Ekspor	21,237.90	15,835.40	11,329.00	12,053.00	2,869.30
Penerimaan Bukan Pajak	351,804.70	354,751.90	398,590.50	269,075.40	280,291.40
Penerimaan Sumber Daya Alam	225,844.00	226,406.20	240,848.30	118,919.10	130,951.00
Bagian laba BUMN	30,798.00	34,025.60	40,314.40	36,956.50	31,164.00
Penerimaan Bukan Pajak	73,458.50	69,671.90	87,746.80	90,109.60	82,816.40

Lainnya					
Pendapatan Badan Layanan Umum	21,704.30	24,648.20	29,681.00	23,090.20	35,359.90
II. Hibah	5,786.70	6,832.50	5,034.50	3,311.90	2,031.80
Jumlah	1338109.60	1438891.10	1550490.80	1761642.80	1848107.20

Sumber : Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Periode 2012-2016

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2012 sebesar Rp 980.518,10 milyar, tahun 2013 Rp 1.077.306,70 milyar, tahun 2014 Rp 1.146.865,80 milyar, tahun 2015 Rp 1.489.255,50 milyar dan tahun 2016 Rp 1.565.784,10 milyar.

Untuk lebih memaksimalkan Penerimaan Pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya Pemerintah, Petugas Pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. (Foukton, 2007 : 3)

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara.

Setelah dilakukannya sosialisasi perpajakan diharapkan seorang pengusaha akan mendaftarkan dirinya secara resmi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Direktur Jendral Pajak (Ditjen) Fuad Rachmany yang dikutip dari Berita Satu tanggal 14 Januari 2014, Ditjen pajak kesulitan melacak keberadaan wajib pajak orang pribadi yang di luar karyawan karena kebanyakan dari mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada tahun baru ini, Ditjen Pajak akan lebih fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di luar karyawan. Selain penjarangan wajib pajak dengan kegiatan sosialisasi dan kepemilikan NPWP, Ditjen Pajak juga melakukan cara lain untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak yaitu pemeriksaan pajak.

Adelina.S dan Agus T. Poputra (2015) meneliti tentang Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung)”, Dari hasil penelitian Kewajiban kepemilikan NPWP, dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung.

Adapun pengembangan kebaruan perbedaan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitiannya di KPP Pratama Bitung. Berbeda dari penelitian terdahulu penulis hanya meneliti tiga variabel yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian terdahulu meneliti empat variabel yaitu kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak sebagai variabel independen dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen. Dan hasil dalam penelitian terdahulu ini Kewajiban kepemilikan NPWP, dan penagihan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung. Pemeriksaan pajak merupakan variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bitung. Hal ini dapat dilihat dari nilai data penagihan pajak yang paling tinggi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dan hasil dalam penelitian Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan positif terhadap penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan memiliki arah hubungan positif

terhadap penerimaan pajak. Dan hasil yang dilakukan peneliti berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu adalah dalam pembuatan NPWP sekarang ini melalui beberapa proses, sebelum membuat NPWP sebagai wajib pajak harus melengkapi berkas dan mendaftar secara online terlebih dahulu atau registrasi *online* dan dalam proses pembuatannya pun lama, banyak wajib pajak yang belum paham dan mengerti mengenai sistem berbasis *online*. Wajib Pajak sering kesulitan dan merasa bingung dalam mengurus NPWP baru karena kurang pemahamnya mengenai suatu sistem. Dan yang menjadi masalah masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum mempunyai NPWP, selain itu juga wajib pajak merasa takut membuat NPWP karena takut dilakukan pemeriksaan atas penghasilan sebelum wajib pajak membuat NPWP. Karena dalam pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk meminimalisasikan potensi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena faktor kemungkinan semakin bagus suatu sistem yang ada tidak menjamin kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam pentingnya mempunyai NPWP. Selain itu juga kemungkinan dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak dan kurangnya sosialisasi petugas pajak. Jika wajib pajak sadar akan pentingnya mempunyai NPWP maka akan berpengaruh baik bagi penerimaan pajak karena mempunyai NPWP merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki pengaruh besar bagi penerimaan negara.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut diatas maka penulis mengambil judul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak ?
2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak ?
3. Apakah Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap besarnya jumlah Penerimaan Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pemeriksaan Pajak terhadap besarnya jumlah Penerimaan Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta sebagai Dharma Bakti Perguruan Tinggi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jurusan Akuntansi pada khususnya.

2. Bagi Praktisi

- a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Manfaat bagi peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, sesuai dengan judul skripsi yang dibahas maka peneliti membatasi masalah yaitu peneliti hanya meneliti tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh data dengan cara yang benar serta pengumpulan data lebih akurat, maka model operasional penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan pengumpulan data-data kuantitatif yang bersumber pada responden dengan teknik pengumpulan data kuesioner yang diolah kedalam *IBM SPSS Statistics 20*.

Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka model penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab seperti dijelaskan berikut ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang yang berkaitan dengan pengertian NPWP serta pemaparan kajian pustaka atau literature yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis.

BAB 3 METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan batasan penelitian, analisa data dan pembahasannya.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang simpulan atau hasil pembahasan analisa dan penelitian, implikasi manajerial dan saran – saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.